



## Dampak Kolaborasi Karang Taruna Sebagai Mitra Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirasa Kota Bekasi

Gusmantiar Syamsi Rohadi<sup>1</sup>, Sari Ningsih<sup>2</sup>, Kiki Setyawati<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Krisnadwipayana

\*Corresponding Author: [sariningsih.moy@gmail.com](mailto:sariningsih.moy@gmail.com)

### ARTICLE INFORMATION

Received: Nov 08<sup>th</sup>, 2025

Revised: Nov 27<sup>th</sup>, 2025

Accepted: Des 01<sup>st</sup>, 2025

Available online: Des 01<sup>st</sup>, 2025

### KEYWORDS

*Collaboration; Karang Taruna; Local Government; Community Empowerment; Youth Participation; Local Development*

### KATA KUNCI

Kolaborasi; Karang Taruna; Pemerintah Daerah; Pemberdayaan Masyarakat; Partisipasi Pemuda; Pembangunan Lokal.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the impact of collaboration between Karang Taruna, a local youth organization, and the municipal government in community empowerment in Jatirasa Sub-district, Bekasi City. The research employed a qualitative approach through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that the collaboration has generated positive contributions to social, economic, and environmental dimensions, particularly by enhancing youth participation, strengthening community-based activities, and facilitating access to empowerment programs. Nevertheless, the study also identifies several challenges that reduce the effectiveness of the collaboration. These include the limited involvement of Karang Taruna in planning processes, high dependency on government support, and programs that do not fully address the specific needs of the local community. Key supporting factors for collaboration include institutional backing, youth enthusiasm, and participatory forums such as local development planning meetings. Conversely, inhibiting factors consist of limited resources, government dominance in policy decisions, and uneven distribution of program benefits. The study emphasizes the need for a more participatory institutional design and capacity-building efforts to strengthen Karang Taruna's role as an equal partner in local development. The implications of this research provide strategic recommendations for local governments and youth organizations to enhance collaborative quality and achieve sustainable community empowerment.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kolaborasi antara Karang Taruna dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jatirasa, Kota Bekasi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut memberikan kontribusi positif pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, terutama melalui peningkatan partisipasi pemuda, penguatan kegiatan sosial, serta fasilitasi akses terhadap program pemberdayaan. Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas kolaborasi. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan peran Karang Taruna dalam proses perencanaan, ketergantungan yang tinggi terhadap



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



dukungan pemerintah, serta program yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Faktor pendukung utama kolaborasi mencakup dukungan kelembagaan, antusiasme pemuda, serta keberadaan forum partisipatif seperti musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan. Di sisi lain, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, dominasi pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan distribusi program yang belum merata. Penelitian ini menekankan pentingnya perancangan kelembagaan yang lebih partisipatif serta penguatan kapasitas organisasi Karang Taruna agar mampu berperan sebagai mitra setara dalam pembangunan lokal. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kualitas kolaborasi untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat menjadi pilar fundamental dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan karena mampu meningkatkan kapasitas sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks perkotaan seperti Kota Bekasi, kebutuhan akan pemberdayaan semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas persoalan sosial. Tingginya mobilitas penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata mengakibatkan munculnya berbagai tantangan yang memerlukan penanganan kolaboratif. Pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Namun, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri mengingat keterbatasan sumber daya dan jangkauan program. Oleh karena itu, kolaborasi dengan aktor lokal menjadi penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan pemberdayaan.

Berbagai persoalan khas perkotaan seperti pengangguran dan kesenjangan akses pendidikan masih menjadi isu utama di Kota Bekasi. Pertumbuhan penduduk usia produktif tidak selalu berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan tingginya jumlah pemuda yang belum memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu, tantangan lingkungan seperti banjir berulang menambah tekanan terhadap kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Situasi tersebut memperlihatkan perlunya pendekatan pemberdayaan



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



yang lebih komprehensif dan melibatkan banyak aktor. Dengan demikian, permasalahan sosial yang kompleks dapat ditangani secara lebih efektif melalui kolaborasi lintas sektor.

Di tingkat kelurahan, pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya untuk merespons berbagai kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Peran organisasi masyarakat menjadi sangat strategis dalam mengisi kekosongan yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi lokal memungkinkan terbentuknya pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan riil. Hal ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, efektivitas pemberdayaan dapat meningkat secara signifikan. Kolaborasi semacam ini menjadi prasyarat penting dalam pembangunan berbasis komunitas.

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang memiliki peran penting dalam mendukung program-program pemberdayaan di tingkat lokal. Berdasarkan Permensos No. 25 Tahun 2019, Karang Taruna bukan hanya sekadar pelaksana kegiatan sosial, tetapi juga agen perubahan yang diharapkan mampu mendorong kemandirian pemuda. Keberadaannya yang tumbuh dari masyarakat memungkinkan organisasi ini memiliki kedekatan dengan kebutuhan warga setempat. Kedekatan tersebut menjadikan Karang Taruna memiliki akses sosial yang luas dan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini menjadikannya sebagai mitra strategis bagi pemerintah kelurahan. Dengan kapasitas tersebut, Karang Taruna memiliki potensi besar untuk terlibat dalam proses pembangunan komunitas.

Di Kelurahan Jatirasa, Karang Taruna telah menunjukkan kontribusi nyata melalui berbagai program sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keterlibatan mereka dalam penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan distribusi bantuan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelatihan UMKM dan kegiatan budaya menambah nilai penting dari kehadiran organisasi pemuda ini. Namun, banyak dari keterlibatan tersebut masih bersifat teknis dan berfokus pada pelaksanaan di lapangan. Karang Taruna belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



strategis di tingkat kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pemuda belum terutilisasi secara optimal.

Ketidakseimbangan peran antara pemerintah dan Karang Taruna terlihat jelas dalam struktur kolaborasi yang berjalan selama ini. Pemerintah masih mendominasi proses pengambilan keputusan sehingga usulan Karang Taruna tidak banyak memengaruhi arah kebijakan. Partisipasi pemuda sering kali hanya dilakukan pada tahap implementasi, bukan perencanaan. Padahal, pelibatan dalam tahap perencanaan diperlukan untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Dominasi pemerintah membuat kolaborasi berjalan secara top-down dan kurang mengakomodasi perspektif pemuda. Akibatnya, efektivitas pemberdayaan tidak mencapai potensi maksimalnya.

Menurut Ansell dan Gash (2008), kolaborasi yang efektif membutuhkan dialog tatap muka yang intensif, pembentukan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman yang disepakati oleh semua pihak. Jika salah satu unsur ini tidak berjalan optimal, maka kolaborasi akan sulit mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks Jatirasa, dialog tatap muka memang ada, tetapi intensitasnya belum cukup untuk membangun pemahaman mendalam antaraktor. Kepercayaan memang tumbuh melalui pengalaman lapangan, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong pelimpahan peran. Keselarasan visi pun belum sepenuhnya terbangun karena perbedaan prioritas antara pemerintah dan pemuda. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih partisipatif.

Berbagai tantangan tersebut mengharuskan adanya evaluasi terhadap praktik kolaborasi yang berjalan. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara sepihak karena membutuhkan sinergi antara kebutuhan lokal dan kebijakan struktural. Ketidakhadiran dialog yang intensif berdampak pada kurangnya pemahaman yang sama atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal ini menyebabkan program yang disusun pemerintah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pemuda. Ketidaksesuaian tersebut membuat banyak program tidak berjalan efektif di lapangan. Evaluasi yang



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



komprehensif dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan kemitraan antara kedua aktor.

Selain tantangan, terdapat pula sejumlah faktor pendukung yang mampu memperkuat kolaborasi di Jatirasa. Regulasi yang mengatur peran organisasi kepemudaan memberi legitimasi bagi Karang Taruna untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan. Modal sosial berupa jaringan pemuda yang kuat juga menjadi modal penting dalam menjalankan program pemberdayaan. Partisipasi pemuda dalam forum Musrenbang memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi, meskipun ruang tersebut belum optimal. Keberadaan forum partisipatif ini sebenarnya merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas kolaborasi. Dengan memanfaatkan faktor pendukung tersebut, kolaborasi dapat dikembangkan secara lebih produktif.

Namun, faktor penghambat juga hadir dan perlu diperhatikan secara serius agar tidak mengganggu keberlanjutan kolaborasi. Dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan menjadi kendala utama yang membuat peran Karang Taruna kurang berkembang. Ketergantungan pada anggaran pemerintah membatasi kreativitas organisasi pemuda dalam merancang program mandiri. Selain itu, kapasitas organisasi yang tidak merata di internal Karang Taruna menghambat pelaksanaan program secara efektif. Distribusi program yang tidak merata juga menurunkan persepsi masyarakat terhadap efektivitas kolaborasi. Faktor-faktor ini perlu ditangani melalui strategi penguatan kelembagaan.

Dampak kolaborasi yang telah berjalan menunjukkan hasil positif dalam kehidupan masyarakat Jatirasa. Peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan sosial menjadi salah satu indikator berkembangnya kesadaran kolektif. Program UMKM dan pelatihan kewirausahaan memperlihatkan adanya manfaat ekonomi yang dirasakan oleh pemuda. Kontribusi Karang Taruna dalam kegiatan lingkungan juga berdampak pada meningkatnya kualitas ruang hidup masyarakat. Kegiatan kebersihan, pengelolaan sampah, dan mitigasi banjir menjadi upaya penting dalam mengurangi risiko lingkungan. Dampak positif ini menunjukkan bahwa potensi kolaborasi sangat besar jika dikelola dengan baik.



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



Meskipun demikian, dampak kolaborasi belum merata di seluruh lingkungan RT/RW di Jatirasa. Beberapa wilayah yang lebih aktif mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan wilayah lain. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan persepsi tentang keberhasilan program pemberdayaan. Distribusi yang tidak merata menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal. Pemetaan kebutuhan masyarakat perlu dilakukan secara lebih komprehensif agar program tepat sasaran. Dengan demikian, kolaborasi dapat memberikan dampak yang adil bagi seluruh warga.

Kondisi Jatirasa memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan terencana. Kolaborasi harus dilihat bukan hanya sebagai kerja sama teknis, tetapi sebagai strategi pembangunan berbasis komunitas. Pemerintah dan Karang Taruna perlu menyamakan persepsi mengenai visi pembangunan agar program yang disusun lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi yang kuat akan menghasilkan inovasi sosial yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan dialog intensif perlu menjadi prioritas utama dalam proses kolaborasi. Melalui upaya tersebut, pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif.

Pada titik ini, penelitian mengenai kolaborasi antara Karang Taruna dan pemerintah kelurahan menjadi relevan untuk menjawab tantangan pemberdayaan masyarakat urban. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan antaraktor, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan memahami dinamika tersebut, strategi penguatan kolaborasi dapat dirumuskan secara lebih tepat. Hasil penelitian juga memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan konsep kolaborasi di tingkat lokal. Pendekatan Ansell dan Gash menjadi kerangka penting dalam menganalisis proses kolaborasi yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kolaborasi berbasis komunitas.



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



Kolaborasi yang efektif membutuhkan pembagian peran yang jelas dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan organisasi pemuda. Setiap aktor perlu menghargai kapasitas dan kontribusi pihak lain agar kemitraan dapat berjalan seimbang. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam perumusan program. Karang Taruna juga harus memperkuat organisasi internal agar mampu menjawab tantangan pembangunan. Melalui pembagian peran yang setara, kolaborasi dapat berkembang menjadi kemitraan strategis. Kemitraan ini pada akhirnya akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat Jatirasa.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses kolaborasi berlangsung di Jatirasa. Fokus penelitian mencakup mekanisme kolaborasi, faktor pendukung, faktor penghambat, serta dampak kolaborasi terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperbaiki kualitas kemitraan antara pemerintah dan Karang Taruna. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih holistik terhadap dinamika sosial di tingkat kelurahan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan lokal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi kolaborasi di wilayah urban lainnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam proses kolaborasi Karang Taruna dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jatirasa, Kota Bekasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan realitas sosial secara naturalistik, khususnya dalam konteks interaksi antar aktor lokal, dinamika organisasi, serta pengalaman masyarakat yang tidak dapat diukur hanya dengan angka. Penelitian ini berfokus pada tiga hal utama, yaitu bagaimana proses kolaborasi terbentuk, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi jalannya kerja sama, serta dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat setempat.



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Jatirasa, Kota Bekasi, mengingat wilayah ini memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks, mulai dari permasalahan pengangguran pemuda, kegiatan ekonomi masyarakat, hingga penanganan banjir yang sering melibatkan Karang Taruna sebagai mitra pemerintah daerah. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih subjek penelitian secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan relevansinya terhadap isu yang diteliti. Informan terdiri atas Lurah Jatirasa sebagai representasi pemerintah daerah, Ketua RW sebagai pemimpin lingkungan, Ketua Karang Taruna dan beberapa anggotanya sebagai pelaku utama organisasi kepemudaan, serta perwakilan masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari program pemberdayaan.

Dalam penelitian kualitatif, jenis data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan naratif, bukan berupa angka atau statistik seperti dalam penelitian kuantitatif. Informasi yang diperoleh umumnya berupa kata-kata, kalimat, ungkapan, cerita, perilaku, dokumen, serta gambar atau rekaman yang menggambarkan realitas sosial dan pengalaman subjektif partisipan. Informasi tersebut bisa berbentuk transkrip wawancara, hasil observasi, catatan lapangan, dokumen pribadi, atau dokumen institusional.

Sumber data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu sumber informasi primer dan informasi sekunder. Sumber informasi primer adalah individu atau kelompok yang menjadi subjek utama penelitian, seperti informan, narasumber, atau partisipan yang secara langsung memberikan informasi melalui wawancara, observasi, atau interaksi. Sedangkan informasi sekunder adalah bahan atau informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari partisipan, tetapi tetap relevan dan mendukung penelitian, seperti dokumen, arsip, buku, laporan, foto, video, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Kedua jenis sumber informasi ini saling melengkapi untuk membangun pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang dikaji.

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pada awal observasi, peneliti harus menganalisis masalah yang terjadi. Namun, jika data yang dikumpulkan dari awal observasi belum cukup untuk menilainya, peneliti



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



dapat melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan yang terlibat. Jika dalam proses wawancara tidak ditemukan jawaban yang memuaskan, peneliti dapat mengajukan pertanyaan tambahan dan mengumpulkan lebih banyak informasi untuk mendapatkan data yang dianggap kredibel.

Prinsip dari teknik analisis data adalah untuk mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan menjadi data yang sistematis, terstruktur, dan teratur. Berikut adalah beberapa tahap analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman:

#### 1. Reduksi Data

Salah satu metode analisis data kualitatif adalah reduksi data. Ini adalah jenis analisis yang mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan isi yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat diperoleh kesimpulan akhir. Pengurangan tidak selalu berarti jumlah data.

#### 2. Penyajian Data

Salah satu metode analisis data kualitatif adalah visualisasi data. Mengorganisasikan kumpulan data untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dikenal sebagai penyajian data. Teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, bagan, jaringan, dan diagram adalah beberapa bentuk penyajian data kualitatif diagram.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Salah satu cara untuk menganalisis data kualitatif adalah dengan menarik kesimpulan. Kesimpulan ini adalah hasil dari analisis dan dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa beberapa dari mereka berdasarkan kalimat, sedangkan yang lain menjelaskan makna variable.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi antara Karang Taruna dan Pemerintah Kelurahan Jatirasa pada dasarnya tumbuh dari kebutuhan bersama untuk menangani berbagai persoalan masyarakat yang semakin kompleks. Pada tahap awal, relasi kedua aktor ini lebih bersifat fungsional, di mana Karang Taruna menjalankan peran-peran teknis dalam aktivitas sosial. Namun, dinamika sosial yang terus bergerak menjadikan peran organisasi kepemudaan ini berkembang dan perlahan bergeser menuju pola kemitraan, meskipun keterlibatannya masih terpusat pada pelaksanaan program ketimbang perumusan kebijakan.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pergeseran peran ini memperlihatkan adanya proses adaptasi kelembagaan. Karang Taruna mulai memosisikan diri sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki kapasitas untuk mendukung pemerintah, bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan. Akan tetapi, keterlibatan tersebut belum didukung oleh mekanisme formal yang menempatkan organisasi pemuda sebagai mitra setara, sehingga hubungan yang terbentuk masih didominasi pemerintah.

Dari aspek kelembagaan, pemerintah kelurahan telah memberikan ruang formal bagi Karang Taruna melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan rapat koordinasi berkala. Ruang ini sejatinya memberikan peluang bagi pemuda untuk menyuarakan aspirasi, tetapi pola pelaksanaannya masih cenderung top-down sehingga tidak sepenuhnya membuka ruang negosiasi dan diskusi yang inklusif. Hal ini menyebabkan partisipasi Karang Taruna sering kali bersifat simbolik.

Keterbatasan lain tampak pada bergantungnya hubungan kerja sama pada komunikasi informal antara pengurus Karang Taruna dan aparat kelurahan. Ketergantungan pada kedekatan personal menjadikan hubungan tersebut rapuh, terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan di salah satu pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi belum sepenuhnya dilembagakan secara struktural.

Jika dianalisis melalui kerangka kolaboratif Ansell dan Gash, pola hubungan ini memperlihatkan dinamika yang menarik. Dialog tatap muka memang terjadi melalui pertemuan-pertemuan resmi, tetapi intensitasnya belum cukup untuk menghasilkan



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



perencanaan kolaboratif jangka panjang. Pertemuan cenderung fokus pada agenda rutin tanpa ruang eksplorasi masalah yang lebih mendalam.

Unsur kepercayaan dalam kolaborasi tumbuh dari pengalaman bersama, khususnya ketika Karang Taruna terlibat dalam penanganan banjir dan kegiatan sosial. Pengalaman lapangan ini memperkuat solidaritas dan menunjukkan bahwa pemuda memiliki kapasitas yang dapat diandalkan. Namun, tingkat kepercayaan yang terbentuk belum cukup kuat untuk mendorong pelimpahan kewenangan yang lebih besar.

Komitmen Karang Taruna terlihat dari keikutsertaan mereka dalam hampir seluruh kegiatan yang diinisiasi pemerintah kelurahan. Tingginya keterlibatan ini mencerminkan motivasi internal pemuda untuk berkontribusi, tetapi komitmen tersebut belum terbalas dengan pelibatan yang setara dalam proses perencanaan. Ketidakseimbangan ini berpotensi mempengaruhi motivasi jangka panjang.

Pemahaman bersama antara pemerintah dan organisasi pemuda belum terbentuk secara utuh. Pemerintah masih memprioritaskan program-program makro yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan pemuda, misalnya terkait isu ketenagakerjaan dan peningkatan kapasitas. Keselarasan visi perlu diperkuat melalui dialog yang lebih sistematis.

Faktor pendukung kolaborasi mencakup keberadaan regulasi formal yang memberikan legitimasi bagi peran organisasi kepemudaan. Selain itu, modal sosial berupa semangat kolektif dan jaringan kerja pemuda turut memperkuat kolaborasi. Partisipasi dalam forum resmi seperti Musrenbang membuka peluang bagi Karang Taruna untuk mengenalkan gagasan-gagasan baru. Namun, berbagai faktor penghambat juga mengemuka. Dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan membuat Karang Taruna tidak memiliki banyak ruang untuk menentukan arah program. Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah menempatkan organisasi ini dalam posisi subordinat, sehingga kreativitas dalam merancang kegiatan mandiri menjadi terbatas.

Kapasitas kelembagaan yang belum merata turut memperlemah efektivitas kolaborasi. Beberapa bidang dalam struktur Karang Taruna belum berjalan optimal, baik



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



dari segi kemampuan teknis maupun pengalaman organisasi. Kondisi ini membuat pelaksanaan sejumlah program tidak mencapai hasil maksimal.

Distribusi program pemberdayaan yang tidak merata di berbagai lingkungan RT/RW juga menjadi hambatan. Program cenderung berpusat pada wilayah tertentu, sehingga sebagian masyarakat belum merasakan dampak nyata dari kolaborasi tersebut. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan sistem perencanaan dan pelaksanaan. Dampak kolaborasi pada aspek sosial cukup signifikan. Kegiatan bersama berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan, memperkuat hubungan antarwarga, dan menumbuhkan kembali nilai gotong royong. Karang Taruna menjadi motor penggerak yang mampu menggerakkan masyarakat secara lebih luas. Pada aspek ekonomi, kontribusi Karang Taruna terlihat dari dukungan terhadap pengembangan usaha mikro serta penyelenggaraan pelatihan bagi pemuda. Pelatihan kewirausahaan dan pengembangan keterampilan dasar memberikan peluang baru bagi kelompok usia produktif untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.

Dampak lingkungan juga terlihat melalui peran aktif Karang Taruna dalam menjaga kebersihan wilayah, pengelolaan sampah, dan mitigasi banjir. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat kesadaran ekologis masyarakat. Secara umum, kolaborasi memberikan implikasi positif bagi pemberdayaan masyarakat Jatirasa. Namun, potensi kolaborasi belum dimanfaatkan secara optimal karena ketidakseimbangan peran dan keterbatasan forum diskusi yang memungkinkan Karang Taruna menyampaikan aspirasi strategis.

Kesenjangan antara harapan pemuda dan kebijakan pemerintah masih menjadi persoalan utama. Banyak kebutuhan pemuda yang belum terwadahi dalam program pemerintah, sehingga diperlukan mekanisme kolaborasi yang lebih responsif terhadap dinamika lokal. Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi, diperlukan penguatan kapasitas organisasi pemuda melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya. Penguatan ini penting agar Karang Taruna mampu berperan sebagai mitra sejajar dalam proses pembangunan.



Lembaga pemerintah perlu mengembangkan model kolaborasi yang lebih inklusif dan partisipatif, misalnya melalui forum dialog terbuka, perencanaan bersama, dan pelibatan pemuda dalam penyusunan kebijakan tingkat kelurahan. Dengan perbaikan mekanisme kolaborasi, Karang Taruna berpotensi menjadi aktor strategis dalam pembangunan masyarakat. Sinergi yang lebih seimbang antara struktur pemerintah dan kekuatan pemuda akan menghasilkan inovasi sosial yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi yang kuat tidak hanya akan memperkuat kapasitas pemuda, tetapi juga menciptakan struktur sosial yang lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Dengan demikian, hubungan kemitraan yang lebih setara merupakan kunci bagi tercapainya pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkesinambungan.

**Tabel 1. Ringkasan Temuan Kolaborasi Karang Taruna - Pemerintah Kelurahan Jatirasa**

Aspek	Temuan Utama	Implikasi
Bentuk Kolaborasi	Kemitraan fungsional; peran Karang Taruna berkembang dari pelaksana teknis menuju mitra pelaksana	Perlu peningkatan peran dalam tahap perencanaan
Kelembagaan	Ruang partisipasi melalui Musrenbang; pola masih top-down	Kolaborasi belum sepenuhnya dilembagakan
Proses Kolaborasi (Ansell & Gash)	Dialog terbatas, kepercayaan tumbuh dari pengalaman bersama, komitmen tinggi, pemahaman bersama belum utuh	Perlu dialog intensif dan penyelarasan visi
Faktor Pendukung	Regulasi, modal sosial pemuda, forum partisipatif	Menjadi dasar penguatan kolaborasi
Faktor Penghambat	Dominasi pemerintah, ketergantungan anggaran, kapasitas terbatas, distribusi program tidak merata	Butuh reformasi mekanisme kolaborasi
Dampak Sosial	Peningkatan partisipasi dan gotong royong	Memperkuat kohesi sosial
Dampak Ekonomi	Pelatihan kewirausahaan dan dukungan UMKM	Meningkatkan kapasitas ekonomi pemuda
Dampak Lingkungan	Pengelolaan sampah, kebersihan, mitigasi banjir	Meningkatkan kualitas lingkungan



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



## SIMPULAN

Kolaborasi antara Karang Taruna dan Pemerintah Kelurahan Jatirasa menunjukkan bahwa kerja sama kedua aktor ini mampu memberikan kontribusi penting bagi proses pemberdayaan masyarakat. Relasi yang terbentuk berkembang dari pola pelaksanaan kegiatan menuju bentuk kemitraan, meskipun struktur kewenangannya belum sepenuhnya seimbang. Peran Karang Taruna semakin terlihat dalam berbagai program sosial, ekonomi, dan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Namun, keterlibatan mereka masih lebih dominan pada tahap implementasi, sementara perumusan kebijakan tetap dikendalikan oleh pemerintah. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pemuda belum dimaksimalkan untuk mendukung perencanaan pembangunan lokal. Kondisi ini menegaskan perlunya mekanisme yang lebih jelas dalam pembagian peran untuk menciptakan kolaborasi yang adil dan efektif.

Secara kelembagaan, pemerintah kelurahan telah menyediakan ruang partisipasi seperti Musrenbang dan rapat koordinasi, tetapi forum tersebut belum mampu mengakomodasi aspirasi pemuda secara komprehensif. Partisipasi yang terjadi masih bersifat formal dan prosedural sehingga belum menghasilkan dialog yang mendalam untuk penyelarasan visi. Keberlanjutan kolaborasi juga sangat dipengaruhi oleh komunikasi informal dan hubungan personal antaraktor. Ketergantungan pada faktor non-struktural menimbulkan risiko ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan yang menjamin kesinambungan kolaborasi secara lebih sistematis. Pembinaan struktur komunikasi dan forum perencanaan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas kemitraan.

Dampak kolaborasi menunjukkan hasil positif pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang terlihat dari meningkatnya partisipasi warga serta berkembangnya berbagai kegiatan pemberdayaan. Karang Taruna berhasil menjadi penggerak masyarakat dalam kegiatan sosial dan lingkungan, termasuk penanganan banjir dan pengelolaan sampah. Di bidang ekonomi, mereka mendukung pelatihan keterampilan dan pengembangan UMKM yang membantu meningkatkan kapasitas produktif pemuda. Meski demikian, pemerataan dampak belum sepenuhnya tercapai karena beberapa



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



program masih terfokus pada wilayah tertentu. Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya evaluasi program agar manfaat kolaborasi dapat dirasakan secara lebih merata. Dengan pemerataan tersebut, peran kolaboratif dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara Karang Taruna dan pemerintah kelurahan memiliki potensi besar untuk diperkuat menjadi kemitraan strategis yang sejajar. Upaya peningkatan kapasitas pemuda, pelibatan dalam perencanaan, serta penyelarasan prioritas kebijakan menjadi aspek fundamental yang harus dikembangkan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih inklusif dan transparan untuk mendorong partisipasi substantif dari organisasi pemuda. Di sisi lain, Karang Taruna juga perlu terus membangun kapasitas internal agar dapat berperan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Jika mekanisme kolaborasi diperbaiki secara sistematis, pola hubungan yang timpang dapat bergeser menjadi kerja sama yang saling menguatkan. Dengan demikian, kemitraan yang lebih setara dan partisipatif menjadi kunci dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Apriliana, E. M., & Pujianto, W. E. (2024). Analisis Peran Organisasi Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gelam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 213- 223.
- Chambers, R. (1993). *Rural development: Putting the last first*.
- Choirina, P., Tjiptady, B. C., Fadliana, A. F., Rohman, M., Wahyudi, F., & Darajat, P. P. (2022). Peningkatan marketing UMKM dengan pelatihan desain grafis untuk karang taruna Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(1), 8-16.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (2nd ed.). SAGE Publications.



Available online at: <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi>

**WINDRADI**

ISSN (Online) 3032-2987 | DOI: <https://doi.org/10.61332/windradi.v3i2.395>



- Hasibuan, M. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Jakarta: Kementerian Sosial RI. Longman.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhari, A. (2025). Kolaborasi dalam penanggulangan bencana: Peran organisasi masyarakat dan pemerintah. Alfabeta.
- Penerbit ABC.
- Silalahi, U. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Bandung: Refika Aditama.
- Soetomo. (2019). Pembangunan masyarakat: Strategi dan intervensi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2013. Strategi-strategi Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suharto, D. (2009). Pemberdayaan masyarakat: Teori dan praktik.
- Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, M. (2009). Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan lokal. Penerbit Andi.
- Sutomo. (2024). Modal Sosial Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Praktik. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group
- Wrihatnolo, R., & Dwidjowijoto, R. (2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan. Jakarta: Elex Media Komputindo.